

EDUKASI



DENI ARMANSYAH/JABAR EKSPRES
KAJI TUNTAS: Darul Hikam Education Conference 2022 bakal usung tema mengenai "Metaverse dan Pendidikan" sebagai rangkaian memperingati hari jadinya ke-56.

Waspadai Ancaman Metaverse

BANDUNG – Untuk memperingati hari jadi ke-56, Yayasan Darul Hikam bakal menggelar Darul Hikam Education Conference (DHEC) 2022 dengan tema "Metaverse dan Pendidikan" pada Senin-Selasa (28-29 Maret) pekan depan.

Ketua Pelaksana DHEC 2022, Yulidzar mengatakan, pada acara tersebut secara khusus bakal mengkaji perihal kesiapan bidang pendidikan di Indonesia menyambut teknologi 4.0, tepatnya, perihal perkembangan metaverse.

"Metaverse dipilih sebagai tema tahun ini karena metaverse sedang hangat diperbincangkan termasuk dalam sektor Pendidikan," ungkap Ketua Pelaksana DHEC 2022, Yulidzar kepada wartawan saat ditemui di SMP Darul Hikam, Rabu (23/3).

"Dalam dunia Pendidikan, metaverse sendiri akan membantu proses pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif," katanya.

Untuk mengerucutkan tema yang begitu luas, lanjutnya, tema tersebut dibagi menjadi beberapa subtema bahasan:

"Metaverse: Peluang atau Ancaman dalam Dunia Pendidikan, Kurikulum Adaptif dalam Metaverse, Penyiapan SDM untuk Pendidikan Era Metaverse, Design Pendidikan Karakter Era Metaverse, Teknologi 4.0 di Ruang Kelas Abad ke-21," katanya.

Ia menambahkan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pihaknya turut mengundang para guru, dosen atau mahasiswa untuk menyajikan praktik, baik, ide-ide baru terkait dengan isu yang diangkat.

"Oleh karena itu, kami membuka Call for Paper (Undangan menyajikan makalah). Dimana makalah yang terpilih akan dipresentasikan dalam sesi paralel di DHEC ke-4. Selain itu, makalah yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal nasional ber-ISSN atau Jurnal Internasional," jelasnya.

DHEC juga, lanjutnya, terbuka bagi pegiat Pendidikan Indonesia yang ingin memperbaharui pengetahuan terkini di bidang Pendidikan dan metaverse.

"Mereka bisa mendaftarkan diri sebagai peserta dalam DHEC. Kami menargetkan sekitar 100 orang hadir di venue acara dan sekitar 150-200 peserta online," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Perguruan Darul Hikam, Ruri. B Ramadhanti mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut sekaligus kontribusi pihaknya untuk dunia Pendidikan Indonesia. **(zar/win)**



DENI ARMANSYAH/JABAR EKSPRES
KIAN MENINGKAT: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jabar Dr. Hening Widiatmoko, MA (kiri) didampingi Kepala Bidang BPBGM Dispusipda Jabar, Dr. H. Ateng Kusnandar Adisaputra, SH, MM (kanan) menyerahkan Sertifikat Akreditasi Pustastakaan Umum kepada Sekretaris Disarpus Kota Bandung belum lama ini.

556 Lembaga Perpustakaan Terakreditasi

Dispusipda Menyongsong Jabar Juara Lahir Batin

BANDUNG - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat sampai pertengahan Maret 2022 sebanyak 556 Lembaga Perpustakaan telah Terakreditasi.

Dengan rincian: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 62 lembaga, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Stanawiyah sebanyak 104 lembaga, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebanyak 267 lembaga, Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 67 lembaga, Perpustakaan Khusus Perangkat Daerah sebanyak 14 lembaga, Perpustakaan Khusus Kabupaten/Kota sebanyak 18 lembaga, Perpustakaan Desa/Kelurahan

sebanyak 23 lembaga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat Dr. Hening Widiatmoko, MA, menjelaskan jumlah 556 Lembaga Perpustakaan yang Terakreditasi ini ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang baru 72 Lembaga Perpustakaan, dan tahun 2021 baru mencapai 470 Lembaga Perpustakaan.

"Adanya kenaikan Lembaga Perpustakaan yang Terakreditasi ini hasil dari sosialisasi yang sudah kami laksanakan baik melalui tatap muka langsung ke sekolah-sekolah, maupun melalui daring, serta hasil koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota, dengan Perguruan Tinggi, dan dengan Perpustakaan Nasional RI," kata Ka-

dispusipda Provinsi Jawa Barat melalui keterangan resminya kepada Jabar Ekspres, Rabu (23/03).

"Kami menyadari, dari total jumlah 24.891 Lembaga Perpustakaan yang ada di Jawa Barat ini masih banyak yang belum terakreditasi, padahal menurut pasal 18 Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan."

"Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, dimasa pandemi Covid-19 ini telah mengeluarkan kebijakan Relaksasi Akreditasi Perpustakaan, dan juga melalui portofolio perpustakaan, dimana untuk proses Akreditasi Perpustakaan ini tidak dilakukan visitasi atau peninjauan lapangan, tetapi hanya melalui pengisian format yang sudah

disiapkan dan dikirim langsung via email ke Perpusnas RI," kata Hening Widiatmoko.

Selanjutnya Kadispusipda Provinsi Jawa Barat, menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan masih rendahnya jumlah Lembaga Perpustakaan di Jawa Barat yang Terakreditasi adalah karena oleh beberapa faktor.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, masih rendahnya pemahaman arti dan manfaat penerapan Standar Nasional Perpustakaan dan Akreditasi Perpustakaan, terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia Perpustakaan yang kompeten dan profesional, dan rendahnya anggaran perpustakaan.

"Sebanyak 300 Lembaga Perpustakaan sudah kami ajukan untuk proses Akreditasi ke Perpusnas RI, mudah-mudahan segera terbit Sertifikat Akreditasinya, sehingga

jumlah Lembaga Perpustakaan di Jawa Barat yang Terakreditasi semakin bertambah, kata Hening Widiatmoko.

"Untuk itu kami terus berupaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sosialisasi dan pembinaan Pra Akreditasi Perpustakaan secara terus menerus, agar semua Lembaga Perpustakaan di Jawa Barat Terakreditasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, untuk memenuhi tuntutan jaman, karena sekarang ini perpustakaan telah bertransformasi menjadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dalam upaya mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi", papar Kadispusipda Provinsi Jawa Barat. **(win)**

Fisip Unpas Gelar PKM

SUBANG - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan melaksanakan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di wilayah Desa Sanca Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat.

Kegiatan PKM kali ini mengangkat tema "Pendampingan Kelompok PKK melalui Penyuluhan Optimalisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat untuk Kader PAUD di Desa Sanca Kecamatan Ciater Kabupaten Subang".

Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD Al-Fattah dan dihadiri langsung oleh Kepala Desa Sanca, Aparatur Desa hingga masyarakat yang sekitar.

Pada kesempatan ini, PKM FISIP UNPAS Dra. Nina Kur-

niasih, M.Si, Andre Ariesmansyah, Danti Nuracti Komarudin dan Nur Fitriani Arningsih) menjelaskan mengenai seberapa pentingnya PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di lingkungan sehari-hari.

Hal ini dilakukan demi memberdayakan anggota rumah tangga, agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat.

"Melalui PHBS masyarakat akan mendapatkan banyak sekali manfaat," kata Dra. Nina Kurniasih, M.Si, Rabu (23/03). Dengan hal kecil, seperti mencuci tangan saja, itu sudah termasuk perilaku PHBS.

Para peserta PKM (Program

Kemitraan Masyarakat) menyambut dengan hangat mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim PKM FISIP UNPAS dan siap untuk mendukung kegiatan PHBS dengan mengaplikasikan secara langsung kepada masyarakat di wilayah Desa Sanca dalam meningkatkan Kebersihan di lingkungan sekitarnya. **(wil/win)**

BERIKAN PENYULUHAN: Program Kemitraan Masyarakat FISIP UNPAS Nina Kurniasih, Andre Ariesmansyah, Danti Nuracti Komarudin dan Nur Fitriani Arningsih memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya PHBS di lingkungan.



FISIP UNPAS FOR JABAR EKSPRES

OPINI

Kisruh Minyak Goreng Tak Kunjung Tertangani

PASOKAN dan harga minyak goreng hingga saat ini masih bermasalah. Alih-alih tertangani, pemerintah justru membatalkan kebijakan harga eceran tertinggi Rp 14.000 per liter dan mengembalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar (Jawa Pos, 17 Maret 2022). Kebijakan satu harga diakhiri karena upaya pemerintah untuk menambah pasokan minyak goreng di lapangan ternyata tidak berjalan efektif. Harga minyak goreng di pasar dilaporkan tak kunjung turun. Masyarakat resah. Selain mahal, minyak goreng dilaporkan juga sulit ditemukan di berbagai toko dan pasar.

Kementerian Perdagangan menyatakan tidak mau berandai-andai apa penyebab masih sulitnya masyarakat memperoleh minyak goreng. Namun, ada dugaan salah satu penyebabnya adalah terjadinya kebocoran minyak sawit DMO (domestic market obligation) ke industri besar atau bahkan diekspor ke luar negeri. Sehingga pasokan untuk kebutuhan dalam negeri menjadi berkurang. Apakah dugaan itu benar, saat ini masih dalam proses penyelidikan. Yang

jelas, efek domino kenaikan dan kelangkaan minyak goreng jika tidak segera tertangani akan merembet ke hal-hal lain yang makin membebani masyarakat.

Untuk mencegah agar harga minyak goreng tidak terus melambung, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebetulnya telah menyiapkan dana subsidi sebesar Rp 7,6 triliun untuk membiayai penyediaan minyak satu harga. Tetapi, karena minyak goreng di pasaran tetap langka, tidak sedikit masyarakat yang kemudian panic buying akibat takut kehabisan stok. Secara garis besar, ada dua faktor yang menjadi penyebab harga minyak goreng tetap tinggi dan ketersediaannya cenderung masih langka di pasaran.

Pertama, akibat ulah spekulasi yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menahan stok minyak goreng miliknya untuk kemudian baru dijual ketika harga sedang melambung tinggi. Di berbagai media massa telah banyak dilaporkan, distribusi minyak goreng di pasar tidak berjalan lancar.

Ancaman sanksi bagi distributor yang menimbun minyak goreng tampaknya tidak membuat mereka takut. Hasrat untuk mengail di air keruh demi keuntungan membuat para spekulan tidak peduli pada penderitaan masyarakat. Saat pasokan di sejumlah daerah menemukan penimbunan minyak goreng secara besar-besaran. Di Sumatera Utara, misalnya, aparat kepolisian pada pertengahan Februari menemukan penimbunan 1,1 juta kg minyak goreng di Deli Serdang. Sementara itu, Polda Sulawesi Tengah dilaporkan juga menemukan penimbunan 53 ton minyak goreng di dua gudang di Kota Palu. Kemudian, Polda Kalimantan Selatan dilaporkan juga berhasil membongkar penimbunan lebih dari 31 ribu liter minyak goreng.

Kedua, kenaikan harga minyak goreng yang tak kunjung turun ada kemungkinan berkaitan dengan perilaku kartel yang memonopoli perdagangan komoditas kebutuhan masyarakat ini. Ada dugaan dari beberapa pihak bahwa perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pangsa pasar minyak goreng dalam



Oleh: BAGONG SUYANTO

negeri mengatur kenaikan harga secara bersamaan. Data KPPIU, misalnya, mencatat sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng dikuasai empat perusahaan besar yang juga memiliki usaha perkebunan, pengolahan CPO, hingga beberapa produk turunan CPO seperti biodiesel, margarin, dan minyak goreng.

Menurut hukum ekonomi, ketika bahan baku minyak goreng harganya naik akibat produksinya menurun, memang logis kalau harga produk olahannya kemudian ikut naik. Seperti diberitakan, para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng dise-

babkan kurangnya pasokan minyak nabati dan minyak hewani di pasar global.

Pada 2020 terjadi penurunan produksi minyak nabati dan hewani sebanyak 266.000 ton sehingga wajar jika harga minyak goreng naik. Namun, kenaikan harga minyak goreng sesungguhnya ironis dan tidak seharusnya terjadi mengingat pasokan minyak sawit di Indonesia selalu melimpah. Bahkan, tercatat Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia.

Setelah kebijakan satu harga dicabut, saat ini toko-toko ritel dilaporkan telah kembali menjual minyak goreng. Sudah tentu dengan harga yang jauh lebih mahal dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Dilaporkan, per liter harga minyak goreng di pasar sekitar Rp 23 ribu lebih.

Memperoleh minyak goreng kini memang lebih mudah. Namun, bukan berarti tidak akan muncul masalah baru. Kita menyadari bahwa kenaikan harga minyak goreng akan bisa melahirkan "efek domino" yang memengaruhi banyak hal. Kenaikan harga minyak goreng terbukti telah merembet dan berpengaruh

pada kenaikan harga bahan dan kebutuhan pangan yang lain seperti harga daging, ayam, dan telur. Selain itu, yang tak kalah berbahaya, kisruh kenaikan harga minyak goreng juga bisa memengaruhi kesehatan masyarakat. Di lapangan, banyak kasus memperlihatkan bahwa para pedagang makanan gorengan keliling ternyata menyalasi kenaikan harga minyak goreng dengan cara tidak kunjung mengganti minyak penggorengannya. Walaupun warnanya telah berubah menjadi kehitaman, beraroma menyengat, dan membahayakan masyarakat yang mengonsumsi.

Di kalangan rumah tangga miskin, tidak sedikit ibu rumah tangga yang juga dihadapkan pada pilihan sulit. Sebagian ibu tidak jarang terpaksa memanfaatkan jelantah atau minyak bekas sisa penggorengan yang sudah tidak layak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari karena harganya yang tidak terjangkau.

Melihat "efek bola salju" kenaikan harga minyak goreng yang bisa merembet ke mana-mana, terutama dampak ne-

gatifnya bagi masyarakat, menangani kisruh minyak goreng tidak bisa lagi ditunda. Belajar dari kisruh yang terjadi selama ini, pemerintah ada baiknya tidak mengandalkan pada pendekatan yang sifatnya reaktif dan temporer. Mengembalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar untuk jangka pendek mungkin dapat meredakan sementara waktu kelangkaan minyak goreng di pasaran. Namun, dalam banyak kasus, kebijakan tambal sulam seperti itu sesungguhnya sangat berisiko.

Untuk jangka panjang, guna mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah ketegasan sikap pemerintah menyalipi monopoli produksi dan pemasaran minyak goreng di pasaran. Sepanjang monopoli minyak goreng masih dikuasai segelintir pengusaha besar, sepanjang itu pula kemungkinan terjadinya kisruh minyak goreng akan tetap terjadi. (*)

***) Penulis adalah Dosen kemiskinan dan dekan FISIP Universitas Airlangga**